



PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan Penyusunan PPAS.....	4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS	5
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH	11
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH.....	13
BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	31
4.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	31
4.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga	34
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	36
BAB VI PENUTUP	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun mengacu pada Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang secara simulatan bersama-sama dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada masing-masing Perangkat Daerah.

Perubahan ini disebabkan adanya perubahan sumber pendapatan, belanja maupun pembiayaan serta terbitnya beberapa pedoman/petunjuk teknis baru baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sehingga berakibat pada perubahan anggaran serta penyesuaian program maupun kegiatan di Perangkat Daerah. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat Perubahan PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen perubahan APBD, penyusunan dokumen perubahan PPAS merupakan tahapan penting karena secara substansi, dokumen perubahan PPAS tahun anggaran 2024 memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah.

Perubahan PPAS sebagai salah satu tahap proses penyusunan Perubahan APBD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan sebagai acuan dalam evaluasi dan pengujian kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD. Struktur anggaran yang optimal dapat dicapai apabila seluruh komponen Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah diukur dalam sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari satu program dan atau kegiatan. Optimalisasi anggaran juga memerlukan dukungan politik (*political will*) dari pimpinan dalam hal ini *Stakeholder* dan Perangkat Daerah, yang akan berimplikasi pada produktivitas dan kinerja aparatur pemerintah yang berwibawa, bertanggung jawab, efisien, akuntabel dan transparan.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat komponen-komponen prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dimana komponen prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Format penyusunan PPAS disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat Rencana Penerimaan Daerah, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan serta Rencana Pembiayaan Daerah.

Setelah dokumen Perubahan PPAS tahun anggaran 2024 tersusun, maka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk

dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran berjalan.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS

Dalam rancangan PPAS-P APBD Kab. Tana Toraja disajikan secara lengkap penjelasan mengenai program/kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan dan kemampuan keuangan daerah, capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai, dan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
2. Menyinkronkan arah kebijakan umum anggaran pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2024 disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi selama tahun anggaran berjalan.
3. Menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan kemampuan dan daya dukung anggaran.
4. Menyesuaikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan perubahan-perubahan yang terjadi selama semester pertama tahun 2024.
5. Mengefektifkan pelaksanaan rencana pembangunan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024.
6. Sebagai dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyusun perubahan RKA-PD mengingat terdapat perubahan pada program, kegiatan, sub kegiatan maupun capaian kinerja.

7. Melakukan pengurangan/penambahan terhadap capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan apabila asumsi KUA sebelumnya tidak tercapai/terlampau;

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS

Dasar hukum Penyusunan Perubahan PPAS Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasetk (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pasetk (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tetang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tamabahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tetang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 6123);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Stadar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repasetk Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Repasetk Indonesia Nomor 6881);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repasetk Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Repasetk Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

30. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Repasetk Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repasetk Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
39. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024.

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Target Perubahan Pendapatan dan Penerimaan APBD Kab.Tana Toraja TA 2024

Kode Rek.	Uraian	APBD Induk 2024	Perubahan APBD 2024	Bertambah/ (Berkurang)	
				Jumlah (Rp)	%
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.194.425.657.000,00	1.188.921.780.651,58	-5.503.876.348,42	-0,46%
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	125.616.421.000,00	125.719.871.543,00	103.450.543,00	0,08%
4.1.01.	Pajak daerah	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	-	0,00%
4.1.02.	Retribusi daerah	12.577.913.000,00	12.577.913.000,00	-	0,00%
4.1.03.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.300.000.000,00	7.403.450.543,00	103.450.543,00	1,42%
4.1.04.	Lain-lain PAD yang sah	83.738.508.000,00	83.738.508.000,00	-	0,00%
4.2.	Pendapatan Transfer	1.051.387.236.000	1.046.027.597.546	(5.359.638.454,00)	-0,51%
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	990.847.218.000,00	981.828.022.323,00	(9.019.195.677,00)	-0,91%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	990.847.218.000,00	981.828.022.323,00	(9.019.195.677,00)	-0,91%
	a. Dana Tranfer Umum	616.455.467.000,00	616.712.348.000,00	256.881.000,00	0,04%
4.2.01.01.01	DBH	11.906.109.000,00	12.162.990.000,00	256.881.000,00	2,16%

4.2.01.01.02	DAU	604.549.358.000,00	604.549.358.000,00	-	0,00%
	b. Dana Tranfer Khusus	274.186.938.000,00	264.910.861.323,00	(9.276.076.677,00)	-3,38%
4.2.01.01.03	- DAK Fisik	103.104.361.000,00	103.104.361.000,00	-	0,00%
4.2.01.01.04	- DAK Non Fisik	171.082.577.000,00	161.806.500.323,00	(9.276.076.677,00)	-5,42%
4.2.01.05	Dana Desa	100.204.813.000,00	100.204.813.000,00	-	0,00%
4.2.02.	Transfer Antar Daerah	60.540.018.000,00	64.199.575.223,00	3.659.557.223,00	6,04%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	52.500.000.000,00	55.349.557.223,00	2.849.557.223,00	5,43%
4.2.02.02	Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi	8.040.018.000,00	8.850.018.000,00	810.000.000,00	-
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	17.422.000.000,00	17.174.311.562,58	-247.688.437,42	-1,42%
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	17.422.000.000,00	17.174.311.562,58	-247.688.437,42	-1,42%
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.194.425.657.000,00	1.188.921.780.651,58	-5.503.876.348,42	-0,46%

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja daerah disusun berdasarkan prioritas dalam Perubahan RKPD dengan memperhatikan prioritas provinsi maupun nasional. Oleh karena itu perubahan belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan program kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan serta unsur pendukung dan unsur penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2024 merupakan prioritas pembangunan pada tahun ketiga RPJMD Kabupaten Tana Toraja 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tana Toraja dan harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan serta mempertimbangkan program kegiatan yang bersifat mandatori. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang terlahir dijabarkan dari Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2020-2024.

Tema pembangunan RKP 2024 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran Tahun 2024 serta kebijakan pembangunan Tahun 2024. Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi serta bersifat lintas pelaku, sektor, wilayah, dan tingkat pemerintahan. Dengan demikian, tema pembangunan RKP Tahun 2024 menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh level pemerintahan dan badan usaha dalam rangka bersama-sama mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah Tahun 2024 yaitu Peningkatan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang inklusif, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif (Tata Kelola)
2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata (Infrastruktur)
3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah (Pengembangan Wilayah Dan Hilirisasi)
4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata (Sosial Ekonomi)
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan (Lingkungan Hidup)

Perubahan Strategi mengacu pada strategi yang termuat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Adapun rumusan strategi untuk Perubahan RKPD tahun 2024 tidak mengalami perubahan dibanding RKPD Pokok Tahun 2024 yakni sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan dan pelayanan public yang didukung oleh peningkatan dan kuantitas SDM aparat dalam pengelolaan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik yang mudah diakses demi berjalannya integrasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis elektronik.
2. Meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang pengelolaan informasi serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik yang mudah diakses masyarakat.
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, akses layanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan diiringi dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat.

4. Memperluas akses, kualitas dan kuantitas sarana pendidikan, yang didukung oleh pemerataan dan ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas serta peningkatan minat baca masyarakat dan penambahan koleksi buku perpustakaan
5. Meningkatkan akses dan keberdayaan perempuan dalam pembangunan dan penguatan kelembagaan perempuan dan anak.
6. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pemenuhan ketahanan pangan berkelanjutan.
7. Meningkatkan akses UMKM, industri rumah tangga, dan ekonomi kreatif terhadap sumber daya produktif, peningkatan iklim usaha yang kondusif, pengembangan produk dan pemasaran, dan penguatan kelembagaan.
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pariwisata, peningkatan daya saing dan daya tarik destinasi, peningkatan pemasaran dan promosi pariwisata terpadu, serta penguatan nilai kearifan dan adat-budaya daerah.
9. Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan serta peningkatan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana.
10. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur daerah dan infrastruktur sosial serta sarana prasarana dan utilitas umum di setiap wilayah.
11. Meningkatkan harmonisasi dan kerukunan umat beragama, penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Tabel 3.1

Visi, Misi Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Tana Toraja

VISI : “TANA TORAJA BANGKIT, PRODUKTIF DAN TANGGUH MENYONGSONG TATANAN KEHIDUPAN BARU”		
Misi 1 : Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Tanggap, Peduli Berbasis Kinerja Yang Didukung Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (E-Governance)		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan keuangan pemerintahan	Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan dan pelayanan public yang didukung oleh peningkatan dan kuantitas SDM aparat dalam pengelolaan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik yang mudah diakses demi berjalannya integrasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis elektronik
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang pengelolaan informasi serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik yang mudah diakses masyarakat
Misi 2 : Memantapkan Sistem Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian Pandemi Covid-19 Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Optimalisasi Pelayanan Kesehatan		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kualitas dan akses layanan layanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, akses layanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan diiringi dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat
Misi 3 : Memperbaiki Fasilitas Pendidikan dan Meningkatkan Mutu Pelayanan Belajar-Mengajar		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan taraf Pendidikan masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Memperluas akses, kualitas dan kuantitas sarana pendidikan,

VISI : "TANA TORAJA BANGKIT, PRODUKTIF DAN TANGGUH MENYONGSONG TATANAN KEHIDUPAN BARU"		
		yang didukung oleh pemerataan dan ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas serta peningkatan minat baca masyarakat dan penambahan koleksi buku perpustakaan
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan akses dan keberdayaan perempuan dalam pembangunan dan penguatan kelembagaan perempuan dan anak
Misi 4 : Memulihkan Roda Perekonomian Daerah Melalui Pemberdayaan Usaha Masyarakat Di Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Air Tawar, UMKM, Industri Rumah Tangga, Ekonomi Kreatif, Sektor Jasa, Dan Usaha-Usaha Produktif Lainnya		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan yang berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat	Meningkatnya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan	Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pemenuhan ketahanan pangan berkelanjutan
Perluasan lapangan kerja melalui pengembangan UMKM, koperasi, industri rumah tangga, ekonomi kreatif, serta peningkatan iklim investasi yang kondusif	Meningkatnya sektor UMKM, Industri rumah tangga, ekonomi kreatif, daya saing koperasi serta investasi daerah	Meningkatkan akses UMKM, industri rumah tangga, dan ekonomi kreatif terhadap sumber daya produktif, peningkatan iklim usaha yang kondusif, pengembangan produk dan pemasaran, dan penguatan kelembagaan
Misi 5 : Mengembangkan Potensi Pariwisata Yang Lebih Variatif, Inovatif Dan Terintegrasi Selaras Dengan Upaya Revitalisasi Kearifan Adat-Budaya Dan Tata Kelola Pelestarian Lingkungan Hidup		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata dan revitalisasi kearifan adat-budaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya pengembangan kepariwisataan yang variatif dan inovatif berbasis kearifan adat-budaya serta sumber daya alam pariwisata	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pariwisata, peningkatan daya saing dan daya tarik destinasi, peningkatan pemasaran dan promosi pariwisata terpadu, serta penguatan nilai kearifan dan adat-budaya daerah

VISI : "TANA TORAJA BANGKIT, PRODUKTIF DAN TANGGUH MENYONGSONG TATANAN KEHIDUPAN BARU"		
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkualitas	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang sehat, tertata, terpadu serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan serta peningkatan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana
Misi 6 : Membangun, Memperbaiki dan Memelihara Infrastruktur (Jalan, Jembatan dan Drainase) serta Sarana-Prasarana Publik Vital		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan pemerataan Pemerataan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah serta sarana prasarana publik vital	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur daerah dan infrastruktur sosial serta sarana prasarana dan utilitas umum di setiap wilayah
Misi 7 : Menguatkan Peran-Serta Seluruh Elemen Masyarakat Dalam Rangka Memperkokoh Kesetiakawanan Sosial Berbasis Akhlak, Moral, Budi Pekerti Dan Sikap Saling Menghormati		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, ramah, berkualitas dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam bingkai kebangsaan dan kebhinnekaan	Terwujudnya penegakan perundang-undangan ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	Meningkatkan harmonisasi dan kerukunan umat beragama, penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat

Adapun Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Prioritas Nasional Tahun 2024

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (RKP 2024)		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD 2024)		PROGRAM PRIORITAS
PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	PD 4	Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
				Program Perizinan Usaha Pertanian
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
				Program Penyuluhan Pertanian
				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
				Program Pengawasan Keamanan Pangan
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
				Program Promosi Penanaman Modal

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (RKP 2024)		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD 2024)		PROGRAM PRIORITAS
				Program Pengembangan UMKM
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
				Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
				Program Peningkatan Kerjasama Desa
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
				Program Penempatan Tenaga Kerja
				Program Hubungan Industrial
				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
				Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
				Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
				Program Rehabilitasi Sosial

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (RKP 2024)		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD 2024)		PROGRAM PRIORITAS
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
PN 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PD 6	Menguatkan interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Program Penyelenggaraan Jalan
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
PN 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PD 2	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (RKP 2024)		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD 2024)		PROGRAM PRIORITAS
				Program Pemberdayaan Sosial
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
				Program Penanganan Bencana
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
				Program Pengendalian Penduduk
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		PD 3	Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				Program Pengelolaan Pendidikan
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
				Program Pembinaan Perpustakaan
				Program Pengelolaan Arsip
				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
				Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
				Program Perlindungan Perempuan
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (RKP 2024)		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD 2024)		PROGRAM PRIORITAS
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
PN 4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PD 7	Mewujudkan tata kehidupan sosial yang harmonis, toleran dan saling menghormati	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
				Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (RKP 2024)		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD 2024)		PROGRAM PRIORITAS
PN 5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PD 6	Menguatkan interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Program Kawasan Permukiman
				Program Penataan Desa
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
				Program Pengembangan Perumahan
				Program Pengembangan Permukiman
				Program Penataan Bangunan Gedung
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
PN 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	PD 5	Pengembangan potensi pariwisata dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup	Program Pemasaran Pariwisata
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Program Pengembangan Kebudayaan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (RKP 2024)		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD 2024)		PROGRAM PRIORITAS
				Program Pembinaan Sejarah
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
				Program Pengelolaan Persampahan
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
				Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
				Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (RKP 2024)		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD 2024)		PROGRAM PRIORITAS
				Program Penanggulangan Bencana
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
PN 7	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	PD 1	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public berbasis Teknologi informasi	Program Pengelolaan Keuangan
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Penyelenggaraan Pengawasan
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Program Kepegawaian Daerah
				Program Perekonomian dan Pembangunan
				Program Administrasi Pemerintahan Desa
				Program Pelayanan Penanaman Modal
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (RKP 2024)		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD 2024)		PROGRAM PRIORITAS
				Program Pencatatan Sipil
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja, 2024

Tabel 3.3

Keterkaitan Prioritas Nasional (RKP), Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024

Tema RKP Nasional Tahun 2024 : <i>“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”</i>	Tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 : <i>“Peningkatan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang inklusif”</i>	Tema RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 : <i>“Peningkatan Produktivitas melalui Pembangunan yang Merata guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Tangguh”</i>
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata (Sosial Ekonomi) 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata (Infrastruktur) 3. Pembentukan karakter dan Akhlaq SDM yang berintegritas, religious dan loyal serta Profesional 4. Pembentukan karakter dan Akhlaq SDM yang berintegritas, religious dan loyal serta Profesional 5. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata (Infrastruktur) 6. Pembangunan kualitas lingkungan	1. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat 2. Memperkuat interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 3. Optimalisasi Pelayanan Kesehatan 4. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan 5. Mewujudkan tata kehidupan sosial yang harmonis, toleran dan saling menghormati 6. Memperkuat interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Tema RKP Nasional Tahun 2024 : “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”	Tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 : “Peningkatan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang inklusif”	Tema RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 : “Peningkatan Produktivitas melalui Pembangunan yang Merata guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Tangguh”
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024
8. Memperkuat Stabilitas Polhukamham dan Transformasi Pelayanan Publik	hidup yang berkelanjutan (Lingkungan Hidup) 7. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif (Tata Kelola)	7. Pengembangan potensi pariwisata dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup 8. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public berbasis Teknologi informasi

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja, 2024

BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024, untuk prioritas dan plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan Perangkat Daerah tercantum pada Lampiran I dan tabel berikut ini.

Tabel 4.1

Rekapitulasi Perubahan Plafon Anggaran Sementara pada
masing-masing SKPD Tahun Anggaran 2024

NAMA OPD	TOTAL BELANJA APBD INDUK (Rp)	TOTAL BELANJA PERUBAHAN APBD 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	404.864.038.640,00	404.864.038.640,00	-
DINAS KESEHATAN	174.677.174.354,00	177.966.326.736,00	3.289.152.382,00
RSUD LAKIPADADA	98.713.085.546,00	124.281.694.858,48	25.568.609.312,48
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	59.988.520.468,00	115.086.136.828,00	55.097.616.360,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	3.236.136.000,00	3.484.527.500,00	248.391.500,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	6.264.328.640,00	7.628.099.000,00	1.363.770.360,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.409.884.040,00	2.658.609.000,00	248.724.960,00
DINAS SOSIAL	2.781.707.000,00	3.063.669.000,00	281.962.000,00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.132.845.160,00	2.200.950.000,00	68.104.840,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.582.859.760,00	12.132.663.000,00	(450.196.760,00)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.758.623.640,00	6.400.121.000,00	(358.502.640,00)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.429.032.680,00	3.621.293.000,00	192.260.320,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG	2.749.830.720,00	3.119.940.000,00	370.109.280,00
DINAS PERHUBUNGAN	4.170.678.960,00	4.337.639.000,00	166.960.040,00
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	3.928.050.880,00	4.212.708.000,00	284.657.120,00
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	10.993.031.920,00	11.329.318.000,00	336.286.080,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.458.770.800,00	2.423.389.000,00	(35.381.800,00)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.011.314.000,00	3.245.567.000,00	234.253.000,00
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8.055.402.440,00	10.718.704.000,00	2.663.301.560,00
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	23.334.808.160,00	23.582.078.000,00	247.269.840,00
SEKRETARIAT DAERAH	24.182.345.510,00	30.642.566.388,00	6.460.220.878,00
SEKRETARIAT DPRD	27.650.153.000,00	30.461.153.000,00	2.811.000.000,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.862.847.000,00	5.086.053.000,00	223.206.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	35.832.377.630,00	240.596.633.689,52	204.764.256.059,52
PPKD	168.050.360.000,00	-	(168.050.360.000,00)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.943.005.960,00	5.556.270.000,00	613.264.040,00
INSPEKTORAT DAERAH	10.000.000.000,00	10.201.558.000,00	201.558.000,00
KECAMATAN MAKALE	10.137.368.760,00	10.477.452.000,00	340.083.240,00
KECAMATAN MAKALE UTARA	3.561.086.920,00	3.497.350.000,00	(63.736.920,00)
KECAMATAN MAKALE SELATAN	3.727.403.880,00	3.810.411.000,00	83.007.120,00
KECAMATAN SANGALLA"	2.180.185.080,00	2.246.435.000,00	66.249.920,00
KECAMATAN SANGALLA" UTARA	2.467.469.400,00	2.535.752.000,00	68.282.600,00
KECAMATAN SANGALLA" SELATAN	1.762.291.240,00	1.757.191.000,00	(5.100.240,00)
KECAMATAN MENGKENDEK	4.656.586.440,00	4.829.067.000,00	172.480.560,00

KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN	3.859.457.960,00	3.585.899.000,00	(273.558.960,00)
KECAMATAN SALUPUTTI	1.699.387.120,00	1.711.234.000,00	11.846.880,00
KECAMATAN REMBON	2.372.157.880,00	2.586.448.000,00	214.290.120,00
KECAMATAN MALIMBONG BALEPE	1.662.379.200,00	1.506.482.000,00	(155.897.200,00)
KECAMATAN RANTETAYO	2.891.067.920,00	2.863.397.000,00	(27.670.920,00)
KECAMATAN KURRA	1.694.234.320,00	1.752.301.000,00	58.066.680,00
KECAMATAN BONGGAKARADENG	1.586.925.200,00	1.638.548.000,00	51.622.800,00
KECAMATAN RANO	960.227.480,00	940.979.000,00	(19.248.480,00)
KECAMATAN BITTUANG	1.652.875.240,00	1.748.396.000,00	95.520.760,00
KECAMATAN MASANDA	827.919.480,00	870.885.000,00	42.965.520,00
KECAMATAN SIMBUANG	1.376.530.200,00	1.461.690.000,00	85.159.800,00
KECAMATAN MAPPAK	1.613.379.160,00	1.672.310.000,00	58.930.840,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	33.259.054.840,00	33.939.969.640,00	680.914.800,00
JUMLAH BELANJA	1.196.009.200.628,00	1.334.362.402.280,00	138.324.701.652,00

Rincian pada masing-masing Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan lebih dijelaskan pada lampiran I (Satu) Rekapitulasi Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Subkegiatan Daerah Perubahan PPAS Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 yang menjadi satu kesatuan dengan dokumen ini.

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa struktur APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasional mempunyai rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terinci dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Belanja Modal Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap lainnya dan Belanja Modal Aset lainnya serta untuk belanja transfer dengan rincian belanja transfer Dana Lembang, Dana alokasi Lembang, Dana bagi hasil ke Lembang. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atas Struktur Belanja APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

Tabel 4.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Objek Belanja

Kode Rekening	Uraian	APBD Induk 2024 (Rp.)	Perubahan APBD 2024 (Rp.)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp.)	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)
5 .	BELANJA DAERAH				
5.1.	Belanja Operasi	874.543.751.536,00	967.466.474.620,00	92.922.723.084,00	10,63%
5.1.01.	Belanja Pegawai	525.126.938.166,00	538.490.749.148,00	13.363.810.982,00	2,54%
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	231.218.453.470,00	269.532.480.572,00	38.314.027.102,00	16,57%
5.1.03.	Belanja Bunga	-	-	0,00	
5.1.04.	Belanja Subsidi	-	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	100,00%
5.1.05.	Belanja Hibah	118.138.359.900,00	154.983.244.900,00	36.844.885.000,00	31,19%
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	60.000.000,00	260.000.000,00	200.000.000,00	333,33%
5.2.	Belanja Modal	153.415.089.092,00	193.817.067.660,00	40.401.978.568,00	26,34%
5.2.01.	Belanja Tanah	-	-	0,00	0,00%

5.2.02.	Belanja Peralatan dan Mesin	22.479.557.426,00	30.104.099.059,00	7.624.541.633,00	33,92%
5.2.03.	Belanja Gedung dan Bangunan	77.508.023.038,00	83.276.268.175,00	5.768.245.137,00	7,44%
5.2.04.	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	53.192.508.628,00	78.643.700.426,00	25.451.191.798,00	47,85%
5.2.05.	Belanja Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	1.530.000.000,00	1.510.000.000,00	7550,00%
5.2.06.	Belanja Aset Modal Lainnya	215.000.000,00	263.000.000,00	48.000.000,00	22,33%
5.3.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00%
5.4.	Belanja Transfer	163.050.360.000,00	163.050.360.000,00	0,00	0,00%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil ke Desa	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	161.850.360.000,00	161.850.360.000,00	0,00	0,00%
JUMLAH BELANJA DAERAH		1.196.009.200.628,00	1.334.333.902.280,00	138.324.701.652,00	11,57%

BAB V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pada Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja akan merencanakan pelaksanaan Pembiayaan Daerah baik Penerimaan Pembiayaan yang bersumber SiLPA tahun sebelumnya maupun Pengeluaran Pembiayaan untuk menambah penyertaan Modal BUMD.

Perubahan Plafon Anggaran Sementara pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan pada Tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1 Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2024

Kode. Rek	Uraian	APBD Induk 2024 (Rp.)	Perubahan APBD 2024 (Rp.)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp.)	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.583.543.628,00	148.412.121.628,42	146.828.578.000,42	9272,15%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.583.543.628,00	148.412.121.628,42	146.828.578.000,42	9272,15%
6.02.	Pengeluaran Pembiayaan	-	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00%
6.2.03.	Penyertaan Modal pada Bank SULSELBAR	-	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00%
PEMBIAYAAN NETTO		1.583.543.628,00	145.412.121.628,42	143.828.578.000,42	9082,70%

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 antara Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Toraja dan menjadi pedoman dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Makale, 8 Agustus 2024

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG

Lampiran I. **Rekapitulasi Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Setiap OPD**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3
1		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD
	1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD

	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
	1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
	1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat

	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya
	2.22.05.2.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	2.22.05.2.03.0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
2.		DINAS KESEHATAN
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	1	NON URUSAN
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional

	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
3.		RSUD LAKIPADADA
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
4.		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	1.03.02.2.01.0051	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai
	1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
	1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
	1.03.02.2.01.0091	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
	1.03.02.2.01.0103	Peningkatan Tanggul Sungai
	1.03.02.2.01.0104	Pembangunan Check Dam
	1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
	1.03.02.2.01.0111	Pembangunan Bendungan
	1.03.02.2.01.0112	Rehabilitasi Bendungan
	1.03.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
	1.03.02.2.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi

	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
	1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
	1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan
	1.03.06.2.01.0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	1.03.07.2.01.0006	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
	1.03.07.2.01.0007	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
	1.03.07.2.01.0009	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
	1.03.09.2.01.0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan
	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan
	1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi
	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
	1.03.11.2.03.0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
	1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	1.03.12.2.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
5.		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	1.04.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
	1.04.03.2.02.0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh

	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
	1.04.04.2.01.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
6.		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
7.		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
	1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
	1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi
	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	1.05.03.2.02.0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
	1.05.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
	1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
8.		DINAS SOSIAL
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
	1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT

	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
9.		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	2.07.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	2.07.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi
	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi
	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman
10.		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
	2.08.02.2.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA
	2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.08.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
	2.14.04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))

	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
11.		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah

	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	2.11.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang
	2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
	2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan
	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
12.		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	2.12.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	2.12.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	2.12.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
	2.12.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud
	2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	2.12.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
	2.12.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
	2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
	2.12.02.2.01.0006	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
	2.12.02.2.01.0008	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk
	2.12.02.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk

	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
	2.12.02.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
	2.12.02.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk
	2.12.02.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk
	2.12.02.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
	2.12.02.2.04.0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk
	2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.01.0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.01.0004	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

	2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.02.0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.02.0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.02.0011	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.03.0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.03.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.03.0003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
	2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	2.12.04.2.03.0002	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	2.12.04.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	2.12.04.2.04.0002	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain
13.		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
	2.13.05.2.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
14.		DINAS PERHUBUNGAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah

	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
15.		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2.16.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
	2.16.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media
	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
	2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
	2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
	2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
16.		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
	3.31.02.2.01.0009	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
17.		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
18.		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

	2.23.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	2.23.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
	2.23.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
	2.23.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
	2.23.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	2.23.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	2.23.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	2.23.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
	2.23.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	2.23.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2.23.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.23.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
	2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
	2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno

	2.23.03.2.01.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	2.23.03.2.02.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
	2.23.03.2.02.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
	2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
	2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
	2.24.03.2.01.0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
19.		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
	2.19.02.2.01.0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
	2.19.02.2.01.0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota
	2.19.02.2.01.0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota
	2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	2.19.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
	2.19.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
	2.19.03.2.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
	2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
	2.19.03.2.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
	2.19.03.2.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi
	2.19.03.2.05.0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
	2.19.03.2.05.0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
	2.19.03.2.05.0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	3.26.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	3.26.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	3.26.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	3.26.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	3.26.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	3.26.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	3.26.02.2.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
	3.26.02.2.04.0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota
	3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota
	3.26.02.2.04.0013	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
	3.26.04.2.02.0011	Fasilitasi pemberian insentif
	3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual
	3.26.04.2.02.0017	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif
	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
	3.26.05.2.02.0002	Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha
	3.26.05.2.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif
20.		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
	3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
	3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	3.27.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
	3.27.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
	3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	3.27.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
	3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecur
	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
	3.27.02.2.04.0002	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
	3.27.02.2.05.0002	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak
	3.27.02.2.05.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan

	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
	3.27.02.2.05.0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
	3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
	3.27.03.2.03.0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
	3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum
	3.27.03.2.04.0001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum
	3.27.03.2.04.0002	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum

	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
	3.27.05.2.01.0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis
	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	3.27.06.2.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

	3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
	3.27.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
	3.27.06.2.02.0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani
21.		SEKRETARIAT DAERAH
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
	4	NON URUSAN
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan

	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
	4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
22.		SEKRETARIAT DPRD
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
	4.02	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu

	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses

	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus
23.		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.01	PERENCANAAN
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
	5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
24.		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
	5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5.02.02.2.04.0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

25.		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.03	KEPEGAWAIAN
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	5.03.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
	5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
	5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

	5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
26.		INSPEKTORAT DAERAH
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	6.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud

	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
27.		KECAMATAN MAKALE
	7	UNSUR KEWILAYAHAN
	7.01	KECAMATAN
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
28.		KECAMATAN MAKALE UTARA
	7	UNSUR KEWILAYAHAN
	7.01	KECAMATAN
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
29.		KECAMATAN MAKALE SELATAN
	7	UNSUR KEWILAYAHAN
	7.01	KECAMATAN
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
30.		KECAMATAN SANGALLA
	7	UNSUR KEWILAYAHAN

	7.01	KECAMATAN
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
31.		KECAMATAN SANGALLA UTARA
	7	UNSUR KEWILAYAHAN
	7.01	KECAMATAN
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
32.		KECAMATAN SANGALLA SELATAN
	7	UNSUR KEWILAYAHAN
	7.01	KECAMATAN
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
33.		KECAMATAN MENGKENDEK
	7	UNSUR KEWILAYAHAN
	7.01	KECAMATAN
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
34.		KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN
	7	UNSUR KEWILAYAHAN
	7.01	KECAMATAN
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
35.		KECAMATAN SALUPUTTI
	7	UNSUR KEWILAYAHAN
	7.01	KECAMATAN
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
36.		KECAMATAN REMBON
	7	UNSUR KEWILAYAHAN
	7.01	KECAMATAN

	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
37		KECAMATAN MALIMBONG BALEPE
	7	UNSUR KEWILAYAHAN
	7.01	KECAMATAN
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
38.		KECAMATAN RANTETAYO
	7	UNSUR KEWILAYAHAN
	7.01	KECAMATAN
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah

	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
39.		KECAMATAN KURRA
	7	UNSUR KEWILAYAHAN
	7.01	KECAMATAN
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
40.		KECAMATAN BONGGAKARADENG
	7	UNSUR KEWILAYAHAN
	7.01	KECAMATAN
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
41.		KECAMATAN RANO
	7	UNSUR KEWILAYAHAN
	7.01	KECAMATAN
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
42		KECAMATAN BITTUANG
	7	UNSUR KEWILAYAHAN
	7.01	KECAMATAN
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
43		KECAMATAN MASANDA
	7	UNSUR KEWILAYAHAN
	7.01	KECAMATAN
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

44		KECAMATAN SIMBUANG
	7	UNSUR KEWILAYAHAN
	7.01	KECAMATAN
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
	7.01.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	7	NON URUSAN
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	7	UNSUR KEWILAYAHAN
	7.01	KECAMATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	7.01.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
45		KECAMATAN MAPPAK
	7	UNSUR KEWILAYAHAN
	7.01	KECAMATAN
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
46		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Makale, 8 Agustus 2024

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG